

FORESTS & FINANCE

NEWSLETTER

Edisi Keempat, September 2017



Rekan-rekan yang terhormat,

Selamat berjumpa kembali dengan buletin *Forests and Finance*. Kuartal ini adalah waktu yang sangat sibuk buat kami, dan siapapun yang bekerja dalam bidang keuangan berkelanjutan di Indonesia. Tentu perhatian kita semua diarahkan kepada POJK tentang Pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan, yang akhirnya diluncurkan pada 20 Juli 2017. Warisan para komisioner OJK periode 2012-2017 itu pertama-tama perlu kita sambut gembira, lalu selanjutnya kita masih perlu mencari ruang untuk penyempurnaannya. Setelah POJK keluar, TuK INDONESIA yang kebetulan menerima kehadiran dua pakar keuangan berkelanjutan global itu, yaitu Myriam Vander Stichele dari SOMO dan Jan Willem van Gelder dari Profundo, mengatur dua acara agar mereka bisa berbicara kepada publik di Indonesia. Lapornya bisa dibaca di buletin ini.

Untuk mendukung POJK tersebut, itu pula TuK INDONESIA menerbitkan dalam versi Bahasa edisi Indonesia dari sebuah buklet sangat terkenal yang ditulis oleh Jan Willem van Gelder. Buklet yang aslinya berjudul “The Do’s and Don’ts of Sustainable Banking”, kini dalam versi Bahasa Indonesia menjadi “Perbankan Berkelanjutan: Apa yang Perlu Dilakukan dan yang Sebaiknya Dihindari”. Bank-bank yang hendak menapaki jalan menuju perbankan berkelanjutan, serta pemangku kepentingannya, diharapkan bisa mendapatkan manfaat dari buklet ini. Selain itu, ada juga berita soal terbitnya dokumen dari Environmental Paper Network, “In the Red: An Assessment of Bank Policies for Financing Pulp and Paper”.

Dari Eropa kita mendapatkan berita soal High-Level Expert Group (HLEG) on Sustainable Finance yang sedang mencari masukan dari para pemangku kepentingan. Artikelnya ditulis langsung oleh Myriam Vander Stichele yang adalah juga anggota HLEG tersebut. Sementara, dari Kanada kita mendapatkan berita bahwa HLEG yang sama juga dibentuk. Kedua berita itu menggambarkan bahwa, di seluruh penjuru dunia, isu tentang keuangan berkelanjutan ini terus menguat.

Selamat membaca dan mengambil manfaat.

Menyambut Gembira POJK Keuangan Berkelanjutan

Oleh: Jalal

Setelah menunggu dengan harap-harap cemas sejak awal 2015, akhirnya kita semua bisa melihat munculnya regulasi keuangan berkelanjutan di negeri ini. Pada tanggal 20 Juli 2017, yaitu hari terakhir komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masa tugas 2012-2017, Indonesia mendapatkan kado yang menggembirakan berupa [Peraturan OJK \(POJK\) 51/POJK.03/2017](#) tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Memang, setelah ditandatangani kita belum bisa melihat regulasi tersebut, lantaran masih harus dicatatkan dahulu di Kementerian Hukum dan HAM, untuk mendapatkan nomor dan menjadi sah diundangkan. Jadi, bagi yang ingin mengetahui detail isinya, masa penantiannya bertambah lagi. Tetapi, pada awal minggu ini, tepatnya Selasa 8 Agustus 2017, akhirnya regulasi ini benar-benar bisa ditilik isinya.

Empat Pertimbangan

Apa pertimbangan OJK mengeluarkan regulasi ini? Ada empat. Pertama adalah “bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif diperlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.” Jadi, terdapat kesadaran dari OJK bahwa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, stabil dan inklusif tak ada cara lain di luar menyelaraskan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Sebaliknya, ketimpangan di antara ketiga aspek itu berakibat ketidakberlanjutan, instabilitas dan eksklusif.

Kedua, “bahwa untuk menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif dibutuhkan sumber pendanaan dalam jumlah yang memadai.” Butir ini sangat penting, mengingat bahwa sumberdaya finansial adalah hal yang mendasar untuk mencapai ekonomi yang berkelanjutan, stabil dan inklusif itu. Dan, sumberdaya tersebut harus tersedia dalam jumlah yang memadai. Bila tidak, maka tujuan untuk mencapai ekonomi yang demikian tidaklah akan tercapai, atau mungkin dicapai dalam waktu yang lebih lama dari yang diinginkan atau direncanakan.

Pertimbangan ketiga adalah “bahwa pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Di sini,

OJK menyatakan bahwa mandat dari keuangan berkelanjutan sesungguhnya bukan hanya berasal dari kebutuhan penciptaan ekonomi yang berkelanjutan, stabil dan inklusif, melainkan juga dari kebutuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 32/2009. Oleh karenanya, dapat diartikan bahwa keuangan berkelanjutan juga adalah keuangan yang kompatibel dengan seluruh tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang termaktub dalam UU tersebut.

Terakhir, “bahwa Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang spesifik dan mengikat untuk seluruh lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.” Jadi, POJK ini sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari substansi Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang terbit pada penghujung 2014 lalu. Artinya juga, target-target yang dinyatakan di Roadmap itu—beserta kerangka waktunya—juga menjadi rujukan dalam membaca POJK ini.

Empat Belas Pasal

Setelah memaparkan pertimbangan dan regulasi-regulasi yang menjadi rujukan, dan memutuskan pemberlakuan POJK ini, Pasal 1-nya memuat berbagai definisi. Yang terpenting, tentu saja, adalah definisi keuangan berkelanjutan itu sendiri, yang dinyatakan sebagai “...dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.”

Pengertian dari menyeluruh tentu saja bukan parsial. Ini berarti sektor jasa keuangan tidak bersikap setengah-setengah—apalagi lebih rendah lagi, seperti hanya melakukan greenwashing—dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini juga berarti bahwa seluruh lembaga jasa keuangan melakukannya, bukan hanya sebagian bank atau asuransi. Selain definisi keuangan berkelanjutan, ada 12 definisi lainnya yang bisa disimak di pasal tersebut.

Pada Pasal 2 diterakan kewajiban menerapkan keuangan berkelanjutan kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam peraturan ini, yaitu lembaga jasa keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik. Definisi masing-masing pihak tersebut dinyatakan dalam pasal sebelumnya. Dari sini, dapat dipahami bahwa sesungguhnya POJK ini bukan sekadar berlaku untuk LJK, sebagaimana yang kerap dipersepsi orang.

Di pasal itu pula terdapat prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, yang disebutkan ada delapan, yaitu: prinsip investasi bertanggung jawab; prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan; prinsip pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup; prinsip tata kelola; prinsip komunikasi yang informatif; prinsip inklusif; prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan prinsip koordinasi dan kolaborasi. Apa yang dimaksudkan pada prinsip-prinsip itu bisa dibaca pada bagian Penjelasan. Namun, sebagaimana yang lazim, maka seluruh prinsip tersebut haruslah ditegaskan. Pelanggaran atas salah satu saja prinsip akan membuat keuangan berkelanjutan tidak tegak.

Pasal 3 menjelaskan bahwa pemberlakuan POJK ini adalah secara bertahap. Bank umum yang masuk kategori BUKU 3 dan 4 serta bank asing adalah yang mendapatkan mandat paling cepat untuk menegakkannya, yaitu mulai 1 Januari 2019. Sementara, dana pensiun yang total asetnya minimal Rp1 triliun adalah yang paling lambat, yaitu pada 1 Januari 2025.

Kewajiban untuk membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dinyatakan pada Pasal 4. Sementara isi dari RAKB sendiri dapat dipelajari pada Lampiran 1 POJK. Pasal 5 menyatakan bahwa RAKB itu wajib dilaksanakan; dan Pasal 6 menyatakan kewajiban untuk mengkomunikasikannya kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi LJK.

Pasal 7 masih tentang RAKB, yaitu wajib disusun berdasarkan prioritas LJK yang sedikitnya terdiri dari pengembangan produk/produk/jasa keuangan berkelanjutan; pengembangan kapasitas internal; serta penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan prosedur operasional standar yang sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan. Apa yang dinyatakan di dalam RAKB itu juga wajib menyertakan target waktu penerapannya.

Kaitan antara keuangan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) disebutkan dalam Pasal 8. Bagi LJK yang diwajibkan melaksanakan TJSL—yaitu LJK yang berbadan hukum perusahaan terbatas—maka sumberdaya finansial TJSL-nya wajib dialokasikan sebagian untuk dukungan penerapan keuangan berkelanjutan. Sementara, emiten dan perusahaan publik yang bukan merupakan LJK namun diwajibkan melaksanakan TJSL dapat (tidak diwajibkan) mengalokasikannya. Alokasinya sendiri wajib diterakan pada RAKB yang dibuat, dan pelaksanaannya wajib dilaporkan di dalam laporan keberlanjutan.

Pasal 9 mengatur tentang insentif dari OJK untuk mereka yang menerapkan keuangan berkelanjutan secara efektif. Bentuknya adalah pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, dan insentif lainnya yang belum didefinisikan.

Kalau di Pasal 8 sudah dinyatakan adanya kewajiban untuk melaporkan kaitan TJSL dengan keuangan berkelanjutan dalam bentuk laporan keberlanjutan, Pasal 10 menegaskan tentang pelaporan keberlanjutan

yang dimaksud. Pembuatannya bersifat wajib, bisa dibuat terpisah dari atau sebagai bagian dari laporan tahunan, wajib diserahkan kepada OJK, dengan tenggat waktu penyerahan dan periode pelaporan sesuai yang ditentukan. Format laporan keberlanjutan yang diwajibkan adalah sebagaimana yang dijelaskan pada Lampiran 2 POJK.

Pasal 11 mengatur tentang penyerahan RAKB kepada OJK, sementara Pasal 12 menjelaskan mengenai kewajiban publikasi laporan keberlanjutan. Pasal 13 mengatur mengenai sanksi, yang seluruhnya bersifat administratif dalam bentuk teguran atau peringatan tertulis. Pasal 14 menyatakan bahwa keberlakuan POJK ini adalah mulai tanggal diundangkan, yaitu 27 Juli 2017.

Bersyukur, Bergembira, Bangga

Secara umum, belum banyak negara di dunia ini yang memiliki regulasi keuangan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia adalah salah satu yang paling maju di antara bangsa-bangsa lain. Hal ini perlu disambut dengan gembira. Kesadaran bahwa ekonomi Indonesia perlu dibuat berkelanjutan, stabil dan inklusif adalah alasan kegembiraan yang lainnya.

Namun, tentu saja, regulasi ini masih mengandung ruang perbaikan yang besar. Yang mana bisa dipahami lantaran regulasi ini merupakan salah satu yang paling awal dibuat. Kita tak punya rujukan yang cukup komprehensif. Dan ini merupakan peluang untuk melakukan perbaikan di masa mendatang.

Salah satu ruang yang paling jelas adalah tentang berbagai kebijakan yang seharusnya dibuat oleh LJK, emiten, dan perusahaan publik untuk menegakkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan itu. Dengan belum dicantumkannya secara eksplisit, maka diperlukan pihak-pihak yang mumpuni untuk membantu mereka semua menginterpretasikannya. Mengingat kondisi bahwa keuangan berkelanjutan belum lagi menjadi pengetahuan banyak pihak, apalagi menjadi arus utama, maka bangsa ini perlu segera belajar bersama soal keuangan berkelanjutan, sambil menjalankannya.

Ruang perbaikan berikutnya yang sangat penting adalah soal sanksi. Kalau kita memiliki kesadaran untuk membuat ekonomi yang berkelanjutan, stabil dan inklusif, sementara itu hanya bisa dicapai dengan keuangan berkelanjutan, maka pelanggaran terhadap prinsip-prinsipnya perlu mendapatkan sanksi yang tegas. Mengapa? Karena pelanggaran itu membahayakan pembangunan Indonesia.

Bagaimanapun, kita perlu mensyukuri terlebih dahulu munculnya regulasi ini lantaran ini menandai Indonesia telah berpikir dalam arah yang benar soal keuangan dan ekonominya. Kita perlu bergembira juga bangga atasnya. Membantu menginterpretasikan, mendukung penegakkannya, dan mencari serta mengisi ruang perbaikan atasnya adalah tugas berikutnya.

Kelompok Tenaga Ahli Eropa untuk Keuangan Berkelanjutan Meminta Masukan

Oleh: Myriam van der Stichele, Peneliti Senior SOMO

Sejak Januari 2017, Kelompok Tenaga Ahli Tingkat Tinggi untuk Keuangan Berkelanjutan ([High-Level Expert Group on Sustainable Finance/HLEG](#)) telah bekerja untuk menyediakan rekomendasi yang sesuai dan konkret kepada Komisi Eropa untuk strategi Uni Eropa yang komprehensif, untuk memastikan agar sektor keuangan memberikan kontribusi kepada keberlanjutan sosial, lingkungan dan ekonomi jangka panjang. HLEG mempublikasikan sebuah [laporan interim pada pertengahan Juli 2017](#), yang telah dipresentasikan pada sebuah acara [dengar pendapat umum \(public hearing\)](#) di Brussels pada tanggal 18 Juli 2017. Komentar terhadap laporan interim tersebut akan tersedia dengan mengisi sebuah [kuesioner konsultasi](#) pada tanggal 20 September 2017. Laporan HLEG akhir diharapkan selesai pada akhir Desember 2017. Komisi Eropa telah menyatakan bahwa akan mengkaji rekomendasi akhir pada kuartal pertama 2018.

Kelompok HLEG dibentuk sebagai bagian dari kebijakan Capital Markets Union (CMU) Uni Eropa, dan merupakan hasil dari sebuah kebutuhan yang mendesak untuk mengatasi perubahan iklim dengan berinvestasi di dalam energi bersih (setidaknya dibutuhkan €180 miliar per tahun untuk Uni Eropa) dan infrastruktur. [Para Anggota](#) datang dari berbagai sektor investasi, begitu juga dengan satu perwakilan perbankan, seorang akademisi, dan beberapa perwakilan LSM, termasuk SOMO.

Fokus utama rekomendasi laporan interim adalah mengenai investasi “hijau” atau iklim yang dilakukan oleh manajer aset dan manajer investasi, perusahaan asuransi dan dana pensiun, melalui lebih banyak kewajiban untuk investasi yang bertanggung jawab (“fiduciary duty”), melalui produk-produk keuangan seperti obligasi hijau (“green bond”) telah didefinisikan dengan lebih baik dibandingkan dengan yang ada saat ini, atau melalui labelled funds yang juga tersedia bagi perorangan.

Namun demikian, bank diakui untuk memiliki kolam aset terbesar, yang mana dapat memainkan peran yang penting di dalam transisi menuju sistem keuangan berkelanjutan. Sayangnya, hingga saat ini belum didefinisikan apakah ini dilakukan dengan melonggarkan persyaratan modal untuk bank-bank yang menyediakan pinjaman hijau atau dengan menghukum pinjaman yang diberikan kepada proyek-proyek yang tidak sesuai dengan tujuan keberlanjutan (“brown activities”) dengan mengenakan persyaratan modal yang lebih ketat.

Sebuah isu penting bagi HLEG adalah untuk menggeser keputusan finansial menjauh dari pendekatan dampak jangka pendek ke pendekatan dampak jangka panjang, yang mana seringkali tidak terlihat di dalam rentang waktu investasi. HLEG mengenali kenyataan bahwa dampak-dampak jangka panjang seperti perubahan iklim dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial, misalkan ketika perubahan iklim menyebabkan devaluasi layanan keuangan atau aset (mis. badai yang lebih sering terjadi dan lebih parah akan mempengaruhi perumahan, operasi pertanian dan bisnis-bisnis yang mana sudah menerima pinjaman dari bank atau yang mana sudah menerima investasi).

HLEG sering mengacu kepada aspek sosial, lingkungan dan tata kelola (Environmental, Social and Governance/ ESG), namun tidak memberikan sebuah definisi. HLEG membedakan antara keuangan untuk iklim, lingkungan (bersama-sama dengan iklim, didefinisikan sebagai “hijau”) dan keuangan “berkelanjutan”, di mana aspek sosial dan tata kelola digabungkan dengan aspek “hijau”. Laporan interim tidak memasukan komitmen Uni Eropa terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), juga tidak memberikan rekomendasi yang konkret mengenai bagaimana mempromosikan kebutuhan sosial masyarakat Eropa, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi ketimpangan dan pendidikan berkualitas bagi semua.

Di dalam laporan interim mereka, rekomendasi tahap pertama HLEG kepada Komisi Eropa adalah:

- Mengembangkan sebuah sistem klasifikasi untuk aset-aset berkelanjutan.
- Menetapkan standar dan label Eropa untuk obligasi hijau dan produk-produk keuangan berkelanjutan lainnya.
- Mengklarifikasi bahwa keberlanjutan merupakan bagian dari “fiduciary duty” dan perwujudan Prinsip Kehati-hatian dan yang terkait, oleh manajer investasi dan investor.
- Memperkuat persyaratan bagi semua perusahaan untuk mengungkap dampak ESG, strategi, dan manajemen risiko.
- Memastikan bahwa seluruh legislasi keuangan Uni Eropa dilakukan “uji (dampak) keberlanjutan”.
- Membentuk fasilitas Uni Eropa untuk menyalurkan pembiayaan kepada proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan.

- Memperkuat peran Otoritas Pengawas Eropa (European Supervisory Authorities/ESA) terhadap bank, pasar keuangan dan dana pensiun untuk menilai risiko-risiko terkait ESG yang mempengaruhi stabilitas keuangan.
- Mengubah aturan-aturan akuntansi relevan untuk membuka investasi di bidang efisiensi energi.

Selain daripada itu, HLEG mengidentifikasi 12 area kebijakan untuk didiskusikan lebih lanjut, seperti:

- Memberikan sinyal-sinyal politik mengenai kebutuhan finansial jangka panjang.
- Mengkaji regulasi untuk membantu pengambilan keputusan yang berbasis jangka panjang.
- Mengintegrasikan keberlanjutan dan risiko-risiko ESG ke dalam peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkatan kredit.
- Menyelaraskan indeks-indeks dan benchmark, yang saat ini cenderung pada investasi pasif dan tidak berkelanjutan, menjadi semakin dekat dengan keberlanjutan.
- Melonggarkan regulasi untuk pembiayaan jangka panjang yang dilakukan oleh bank dan perusahaan asuransi.
- Secara resmi mendukung pengembangan proyek-proyek berkelanjutan dan pembiayaannya.
- Meningkatkan keterlibatan lembaga-lembaga penelitian dan masyarakat di dalam keuangan berkelanjutan.
- Memobilisasi modal swasta bagi pengelolaan dimensi sosial, khususnya melalui bisnis sosial.

Walaupun HLEG memiliki mandat untuk mengusulkan langkah-langkah regulasi, namun HLEG masih belum memberikan rekomendasi regulasi konkret untuk

mendorong modal kepada kegiatan-kegiatan yang terfokus untuk membalik perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati, mendorong pembangunan yang berkelanjutan secara sosial, dll. Ketika inisiatif, usaha dan kegiatan berkelanjutan mungkin hanya membutuhkan investasi atau pinjaman dalam jumlah kecil, laporan interim berasumsi bahwa investor kelembagaan (“institutional investors”) ingin melakukan investasi dengan jumlah besar dalam bentuk insentif, pelonggaran regulasi dan metode terstandarisasi, atau melalui dukungan resmi untuk mengelompokkan proyek-proyek kecil di dalam kolam aset yang besar.

Sekelompok [LSM Eropa telah mengeluarkan sebuah pernyataan penting terhadap laporan interim HLEG.](#) Antara lain, LSM-LSM tersebut menyayangkan bahwa ESG belum didefinisikan dengan jelas, dan juga belum dijelaskan bagaimana proses Uni Eropa untuk mendefinisikan ESG tersebut, hak asasi manusia, dan isu-isu lingkungan yang lebih luas belum dimasukkan. Mereka meminta langkah-langkah regulasi yang lebih ketat.

Terlepas dari HLEG dan Unit EC (DG FISMA) yang meluncurkan HLEG, Unit Penelitian Kebijakan Strategis Komisi Eropa juga telah mengeluarkan sebuah laporan berjudul “[Membiayai Keberlanjutan – Memicu Investasi untuk Ekonomi Bersih](#)” pada tanggal 8 Juni 2017. Laporan ini menekankan kebutuhan akan perubahan di dalam sektor keuangan, begitu juga di dalam kebijakan dan regulasi Uni Eropa. Direktorat Jenderal Lingkungan Hidup dari Komisi Eropa juga baru-baru ini memulai sebuah studi mengenai “Keuangan Hijau: Definisi dan Implikasinya bagi Investasi”.

Sumber: [SOMO](#)

Belajar dari Dua Pakar Keuangan Berkelanjutan Global

Oleh: Jalal

Dalam kurun waktu hanya sekitar satu bulan, dua pakar keuangan berkelanjutan global datang ke Indonesia. Keduanya punya beragam urusan, namun sama-sama bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pemikiran dengan publik di Indonesia. Yang pertama, Myriam Vander Stichele dari SOMO (Center for Research on Multinational Corporation), yang memberikan kuliah di Universitas Trisakti pada tanggal 5 Agustus 2017. Yang kedua, Jan Willem van Gelder dari Profundo, yang mempresentasikan gagasannya di Mercantile Club pada 7 September 2017.

Apa yang bisa kita pelajari dari kedua pakar tersebut? Sangat banyak, tentu saja. Namun, untuk kepentingan keringkasan dari artikel ini, maka hanya pelajaran-pelajaran yang terpenting saja yang akan disampaikan di sini. Pertama-tama, dengan meringkas isi materi yang mereka sampaikan masing-masing. Kedua, dengan menunjukkan kesimpulan paling penting yang bisa kita ambil dari keduanya.

Myriam dan Praktik Keuangan Berkelanjutan

Presentasi Myriam diberi judul Sustainable Finance: What It Means in Practice (for Accountants). Dalam pembukaannya, dinyatakan bahwa tujuan presentasi ini untuk mendiskusikan tiga hal. Pertama, apa nilai penting dari keuangan berkelanjutan terhadap profesi akuntan dan ekonomi secara keseluruhan. Kedua, bagaimana peran yang dimainkan oleh berbagai lembaga jasa keuangan terhadap pembangunan berkelanjutan—termasuk dan terutama SDGs dan Kesepakatan Paris. Ketiga, apa saja alternatif solusi yang tersedia dari keuangan berkelanjutan.

Hingga sekarang, laporan perusahaan yang dianggap paling penting adalah laporan keuangan tahunannya. Isinya adalah pernyataan keuntungan serta strategi bagaimana keuntungan itu diperoleh. Sayangnya, laporan itu tidak berisikan bagaimana keuntungan itu dalam praktiknya benar-benar didapat. Demikian juga, tak ada laporan tentang dampak yang komprehensif atas praktik perusahaan dalam mendapatkan keuntungannya itu. Lantaran dibatasi periode pelaporan setahun, maka apa yang terjadi dalam jangka yang lebih panjang juga tak dilaporkan secara memadai. Padahal, dampak jangka panjang inilah yang akan memengaruhi kondisi—termasuk profitabilitas—perusahaan dan ekonomi secara umum.

Karenanya, perusahaan—termasuk para akuntan yang berada di dalamnya—sangat perlu untuk menyadari bahwa laporan keberlanjutan adalah norma baru yang penting. Perusahaan-perusahaan global sudah mengadopsi bentuk pelaporan ini. Governance and Accountability Institute melakukan pelacakan dan menemukan perkembangan yang sangat cepat. Apabila pada tahun 2011 baru 20% dari perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam S&P 500 yang memiliki laporan tersebut, pada awal 2016 proporsinya sudah mencapai 81%. Dan, yang terpenting untuk disadari, adalah isinya yang komprehensif, yaitu isu-isu tata kelola, ekonomi, sosial, dan lingkungan terkait perusahaan—bukan kegiatan karitatif.

Tantangan bagi perusahaan jasa keuangan adalah ragam dari jasa keuangan termasuk transaksi derivatif. Ini berarti memerlukan pemahaman atas dampak apa saja dari jasa keuangan yang mereka berikan. Lebih jauh lagi, kalau di masa depan kita harus menggeser ke arah ekonomi yang rendah (atau bahkan tanpa) karbon, maka perlu diketahui pula berapa jumlah pembiayaan yang dibutuhkan dan oleh siapa. Di level global kini diperkirakan bahwa transisi itu membutuhkan USD90 triliun dalam 15 tahun, tetapi berapa nilainya di Indonesia belumlah diketahui secara tepat. Di level global juga sudah diketahui bahwa sekitar 10% pinjaman bank sekarang ditujukan untuk mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan, sementara obligasi yang demikian hanya sekitar 1% saja. Di Indonesia, kita belum mengetahuinya.

Bagi lembaga jasa keuangan, isu-isu keberlanjutan—seperti perubahan iklim, polusi, kemiskinan dan HAM—sesungguhnya sangat relevan. Namun, belum banyak yang menyadarinya. Dari sudut pandang risiko saja, sangat jelas bahwa membiayai kredit perumahan yang nilainya turun lantaran ternyata daerahnya kerap dikunjungi angin topan, membiayai operasi migas yang mengalami masalah aset terdampar (stranded assets), membiayai kegiatan pertanian yang menghadapi bencana kekeringan dan banjir, atau membiayai perkebunan yang tanahnya bersengketa dengan masyarakat, seluruhnya memiliki risiko tinggi. Sudah seharusnya para analis kredit memahami isu-isu seperti itu dalam mengambil keputusan pembiayaan.

Soal stranded assets ini menjadi perhatian Myriam dengan sungguh-sungguh. Dengan mengambil contoh industri kelapa sawit dengan berbagai konteksnya,

stranded assets—yang didefinisikan sebagai segala jenis properti berharga milik perusahaan yang mengalami penurunan nilai dalam waktu yang relatif cepat—memang sangat penting. Kebun yang sudah dikembangkan perusahaan, bila kemudian terbukti adalah milik pihak lain bisa tiba-tiba tidak berharga. Bila perusahaan tidak mengelola hubungan sosial dengan memadai, dan masyarakat menghentikan operasi perusahaan, aset kemudian menjadi sulit dimanfaatkan. Bila perusahaan terlibat dalam kebakaran hutan, dan mendapatkan hukuman dari pemerintah, maka nilainya juga bisa turun. Bahkan, lantaran perusahaan dianggap merusak hutan dan bertanggung jawab pada perubahan iklim, bisa jadi konsumen—terutama di Eropa dan AS—memutuskan kontrak pembelian dan perusahaan menjadi sasaran kampanye negatif. Itu semua bisa menurunkan nilai (properti) perusahaan dalam waktu yang sangat cepat.

Myriam mengungkapkan bahwa masalah-masalah seperti yang telah disebutkan sesungguhnya bisa dicegah dari hulu, apabila lembaga-lembaga jasa keuangan mau mengadopsi keuangan berkelanjutan. Apa yang menjadi karakteristik keuangan berkelanjutan ada 4, yaitu: menghormati standar nasional dan internasional terkait isu-isu keberlanjutan; melindungi lingkungan dan mencegah perubahan iklim; mencegah dampak negatif jangka panjang atas keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan; dan transparan dalam apa saja dan bagaimana proyek dibiayai. Terkadang, keuangan berkelanjutan didefinisikan sebagai implementasi kebijakan lingkungan, sosial dan tata kelola (environment, social, and governance, disingkat ESG). Masalahnya, memang apa yang masuk ke dalam masing-masing aspek itu belum secara tegas diregulasi.

Myriam kemudian mengajukan sebuah definisi progresif atas keuangan berkelanjutan, yaitu: "...contribute in transparent way to improving social and environmental aspects in short and long term, pro-actively aim to achieve the SDGs and the Paris Agreement, implement ESG issues throughout their value chain, and avoid financial instability." Menariknya, ia juga melihat bahwa keuangan Islam—atau keuangan syariah—yang relatif populer di Indonesia bisa menjadi dasar bagi keuangan berkelanjutan yang progresif itu, apabila memasukkan kebijakan terkait dukungan terhadap SDGs, misalnya terkait pengentasan orang miskin dan pembiayaan infrastruktur berkelanjutan.

Lalu, bagaimana caranya memastikan bahwa transisi menuju keuangan berkelanjutan itu terjadi? Menurut Myriam, ada 4 hal terpenting untuk itu. Pertama adalah regulasi keuangan yang memasukkan unsur-unsur ESG yang jelas. Kedua, pembiayaan yang menghindari berbagai dampak negatif, mendukung proyek-proyek berkelanjutan, dan pada akhirnya menuju kepada pembentukan bank-bank berkelanjutan. Ketiga, analisis risiko dan penilaian dampak yang kokoh, termasuk oleh lembaga pemeringkatan kredit, uji tuntas oleh pemberi pinjaman, sertifikasi keberlanjutan, serta informasi dari komunitas dan LSM. Dan terakhir, transparansi informasi maksimum oleh perusahaan jasa keuangan atas

dampak keberlanjutan yang benar-benar dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Dalam hal tersebut, Myriam menekankan bahwa LSM memang sudah aktif dalam memberikan masukan dan tekanannya, kumpulan perusahaan sendiri sudah bergerak untuk membuat standar-standar sukarela seperti RSPO di industri kelapa sawit, namun itu tidak memadai tanpa regulasi yang kokoh dan pemerintah. Yang belakangan inilah yang dinilai Myriam paling terbelakang, sehingga perlu diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Masih terlampau sedikit negara yang memiliki regulasi keuangan berkelanjutan, termasuk di Eropa. Regulasi pendukungnya, seperti insentif fiskal dan indikasi jumlah uang yang dibutuhkan untuk mencapai SDGs dan Kesepakatan Paris, juga belum jelas.

Jan Willem dan Tantangan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

Jan Willem memulai presentasinya dengan menunjukkan tiga grafik yang menunjukkan tantangan keberlanjutan. Pertama, grafik yang menunjukkan bahwa populasi global yang kini telah melampaui 7 miliar orang diperkirakan akan mencapai 9 miliar di tahun 2050. Pada saat yang sama, kebutuhan pangan masing-masing orang cenderung meningkat. Kalau pada dekade 1960an setiap orang mengkonsumsi sekitar 2.000 kalori/hari, pada tahun 2030 saja diperkirakan akan semakin dengan dengan 3.000 kalori/hari. Demikian juga dengan kebutuhan energi global yang bila pada tahun 2015 lalu belum mencapai 600 exajoules, pada 2035 kelak diperkirakan mencapai hampir 800 exajoules. Dengan peningkatan yang seperti itu, Jan Willem mengingatkan: kita hanya punya satu Bumi, dan kita sekarang sudah memanfaatkan sumberdaya yang melampaui 1,5 kali lipat daya dukungnya.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah tujuan, target, dan cara yang disepakati oleh 193 negara—termasuk Indonesia—untuk menjawab tantangan itu. Sehingga, keuangan berkelanjutan sangatlah terkait dengan SDGs, yaitu sistem keuangan yang diarahkan untuk mencapai SDGs dan tujuan lain yang terkait, seperti Kesepakatan Paris. Menurut Jan Willem, ada tiga cara mencapainya, yaitu, (1) melalui pembiayaan inovasi produk yang memenuhi beragam kebutuhan global di bidang pangan, energi, papan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya, (2) melalui pembiayaan yang menjamin pemanfaatan sumberdaya alam secara hati-hati dan efisien, dan (3) melalui pembiayaan yang berperspektif keadilan sosial, yang memastikan bahwa setiap orang bisa mendapatkan kehidupan yang layak.

Kebijakan-kebijakan keuangan berkelanjutan pun diperlukan untuk memastikan ketiganya bisa terlaksana. Hingga sekarang, dikenal dua jenis kebijakan, yaitu yang dikembangkan oleh lembaga jasa keuangan, terutama bank, sendiri; serta yang dikembangkan secara kolektif. Yang disebut belakangan ini contohnya adalah UNEP

Finance Initiative, Equator Principles, dan OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Kebijakan-kebijakan yang dibuat secara kolektif kemudian juga banyak diadopsi dan diadaptasi oleh perusahaan keuangan.

Indonesia sendiri, dalam pandangan Jan Willem, memiliki sejumlah tantangan yang menurutnya membuat keuangan berkelanjutan menjadi mendesak untuk diberlakukan. Mengutip survei yang dilakukan oleh OECD pada Oktober 2016, masih ada 28 juta warga Indonesia yang masuk kategori miskin, sementara kesenjangan kaya-miskin di sini adalah salah satu yang paling lebar di dunia. Anggaran pembangunan oleh pemerintah, dan pemasukan dari pajak, juga masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk tetangga terdekat. Korupsi masih tinggi, dan menghambat pertumbuhan serta kesejahteraan. Kondisi lingkungan dan kesehatan yang buruk juga menjadi tantangan tersendiri untuk keberlanjutan dan dalam mewujudkan inklusi pembangunan.

Dalam kondisi yang penuh tantangan seperti itu, bank-bank yang ada di Indonesia—sebagai bagian penting dari lembaga jasa keuangan—sendiri masih jauh dari praktik atau bahkan ide keuangan berkelanjutan. Mengutip penelitian mutakhir Responsibank, Jan Willem menunjukkan bahwa bank lokal yang skor kebijakannya terbaik adalah Danamon, yang hanya mendapatkan 16,35 dari 100. BNI yang mendapatkan tempat kedua terbaik—dan satu-satunya bank dari Indonesia yang menjadi anggota UNEP FI—malahan hanya mendapatkan skor 9,89. CIMB Niaga, yang terendah dalam penelitian tersebut, memiliki skor 3,46.

Jan Willem kemudian menunjukkan sisi yang lain mengapa keuangan berkelanjutan itu penting, yaitu melalui industri kelapa sawit. Secara 'teori', industri ini sangatlah menjanjikan bagi Indonesia. Perkebunan kelapa sawit bisa memanfaatkan kekayaan lahan yang dimiliki Indonesia untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pendapatan dari kelapa sawit bisa diperoleh dari ekspor ke berbagai negara, pajak yang dibayarkan, selain pendapatan lainnya. Peluang ketenagakerjaan yang timbul juga tidak sedikit, dan tentu saja peluang kerjasama produksi antara perkebunan inti dan plasmanya. Indonesia yang kini menguasai setidaknya 47% produksi minyak sawit dunia bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

Sayangnya, sisi baik dari industri ini juga disertai berbagai eksekusi yang membuat 'teori' itu tak seindah realitasnya. Dari sisi lingkungan, deforestasi dalam 15 tahun sangat banyak yang terkait dengan pembukaan kebun kelapa sawit, demikian juga dengan kebakaran hutan. Hilangnya keanekaragaman hayati, hutan dengan carbon stock yang tinggi, termasuk lahan-lahan gambut juga terkait dengan ekspansi kelapa sawit. Di sisi sosial, konflik lahan dengan masyarakat, pelanggaran hak-hak tenaga kerja, serta ketimpangan hubungan dengan petani kecil telah banyak didokumentasi. Persoalan tata kelola juga sangat jelas, terutama terkait dengan penghindaran pajak yang

dilakukan sejumlah perusahaan kelapa sawit, juga korupsi.

Di sinilah peran penting keuangan berkelanjutan. Bagaimanapun, industri kelapa sawit—dan industri apapun—memerlukan pembiayaan. Sehingga, apabila para pembiaya itu bisa memersyaratkan aspek-aspek ESG itu secara merata, menciptakan level playing field dalam keberlanjutan, tentu pengaruhnya akan sangat besar. Apa yang perlu dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, menurut Jan Willem, adalah memahami isu-isunya secara komprehensif, mengembangkan visi yang jelas untuk keberlanjutan setiap sektor yang dibiayai, membuat berbagai kebijakan dengan standar yang jelas, melatih staf untuk menegakkan kebijakan yang dibuat, menapis proposal pembiayaan dari klien dengan kebijakan yang baru, melakukan pemantauan terhadap kinerja keberlanjutan klien, merundingkan tindakan-tindakan perbaikan yang perlu dilakukan oleh klien, serta membuat mekanisme penyelesaian keberatan.

Dalam hal ini, Jan Willem menyatakan bahwa HSBC—yang merupakan tuan rumah dalam diskusi tersebut—berada di jalur yang tepat. HSBC, dalam penilaian Responsibank, adalah bank dengan skor kebijakan kehutanan tertinggi, yaitu 56,25 dalam skala 100. Selain karena sudah lama memiliki sejumlah kebijakan keberlanjutan, sebagai anggota RSPO yang baru saja memperbarui kebijakan untuk industri kelapa sawitnya, HSBC mendapatkan skor yang jauh di atas bank-bank Indonesia. Tetapi, tentu saja skor tersebut masih bisa ditingkatkan lebih jauh. Masalahnya, kompetisi yang belum adil dengan bank-bank lainnya di kawasan Asia Tenggara mungkin membuat HSBC ragu untuk melangkah lebih jauh lagi.

Tetapi, HSBC jelas memiliki kapasitas untuk menjadi lebih baik lagi. Jan Willem menunjukkan setidaknya dua jalur pengaruh yang sangat kuat bisa dimainkan oleh HSBC. Pertama, dalam pembiayaan industri kelapa sawit, antara 2010-2017 berpartisipasi dalam 102 sindikasi pembiayaan, dengan total USD2,9 miliar. Kedua, HSBC sendiri juga meminjamkan uang kepada bank-bank lainnya di kawasan ini, termasuk melalui loan sebesar USD4,4 miliar, serta underwriting sebanyak USD9,7 miliar (termasuk obligasi yang bernilai USD4,5 miliar). Dengan kekuatan kapital seperti itu, jelas HSBC punya pengaruh besar yang bisa dimanfaatkannya untuk mendorong keuangan berkelanjutan.

Jan Willem kemudian menjelaskan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan membuat Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan dan POJK tentang Pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan sangatlah tepat. Langkah selanjutnya yang dipandang sangat krusial adalah mewajibkan pelaporan berkelanjutan yang memanfaatkan standar dari Global Reporting Initiative (GRI), memastikan adanya mekanisme penyelesaian keberatan terhadap pembiayaan, serta membuat regulasi tanggung jawab bersama dalam kinerja sosial dan lingkungan antara klien dengan pembiayanya. Khusus terkait

industri kelapa sawit, OJK bisa memastikan eksklusi deforestasi, high conservation value (HCV), dan gambut; menerapkan free, prior and informed consent terhadap masyarakat adat dan lokal; mengadopsi standar ILO tentang ketenagakerjaan dan UN Guiding Principles on Business and Human Rights; dan mengidentifikasi serta mencegah korupsi dan penghindaran pajak.

Harapan juga disematkan Jan Willem kepada LSM seperti TuK INDONESIA yang menjadi salah satu penyelenggara diskusi. Pertama, agar semakin giat mendampingi masyarakat yang mengalami konflik, dan berusaha menuntaskan kasus-kasus itu. Kedua, mendukung lembaga jasa keuangan dalam mengadopsi berbagai kebijakan yang relevan untuk keberlanjutan, serta mendorong pemanfaatan kekuatan lembaga jasa keuangan dalam menyelesaikan konflik. Terakhir, memberikan data yang relevan kepada lembaga jasa keuangan supaya mereka bisa mengambil keputusan pembiayaan dengan tepat, juga dalam melakukan pemantauan.

Pesan-pesan Terpenting

Jelas, kedua pakar tersebut menyatakan bahwa keuangan berkelanjutan ini bukanlah tantangan yang mudah diselesaikan oleh Indonesia atau negara manapun. Menyeimbangkan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang adalah keniscayaan, dan karena selama ini fokusnya kebanyakan hanya di jangka pendek, maka cakrawala waktu perlu ditarik jauh ke depan. Ini bukanlah pekerjaan yang ringan. Keniscayaan yang lain untuk hal itu adalah kerjasama erat antar-pemangku kepentingan keuangan berkelanjutan, bukan saja dengan pemangku kepentingan di dalam negeri, melainkan juga di tingkat regional dan global—mengingat asal kapital yang

diinvestasikan di Indonesia adalah juga dari negeri-negeri lain.

Berbagi data adalah hal yang sangat ditekankan oleh Myriam dan Jan Willem. Keduanya menyatakan bahwa baik untuk keperluan uji tuntas sebelum keputusan pembiayaan itu diambil, maupun untuk keperluan pemantauan, data yang sah adalah esensial. Data yang sah juga yang bisa berperan penting dalam menyelesaikan berbagai konflik; sementara minimnya konflik adalah prasyarat agar operasi bisa berjalan lancar dan manfaat bagi seluruh pihak bisa dirasakan.

Konflik juga merupakan sumber dari permasalahan aset terdampar yang bakal membuat perusahaan dan lembaga jasa keuangan yang membiayainya terpapar pada risiko finansial. Sehingga, penyelesaian konflik dengan cara-cara yang adil dan menjamin kedamaian yang hakiki sesungguhnya merupakan kepentingan seluruh pihak. Kedua pakar menekankan bahwa Indonesia perlu memastikan bahwa kebun atau aset berharga perusahaan-perusahaan sektor apapun tidak menjadi terdampar dan muspra. Oleh karenanya, isu ini perlu benar-benar dipahami untuk dihindari.

Terakhir, sangat jelas bahwa Myriam dan Jan Willem menempatkan SDGs dan Kesepakatan Paris sebagai aspirasi yang tepat untuk memandu keberlanjutan seluruh sektor, tak terkecuali sektor keuangan. Jelas, keduanya itu tidaklah mudah dicapai, dan interpretasinya yang tepat secara lokal dan oleh masing-masing sektor juga masih perlu dibuat. Jelas, bukan tugas yang mudah. Tetapi, seperti kalimat terakhir yang dinyatakan oleh Jan Willem dalam presentasinya, "A long road to go, but there's no alternative," jalan itulah satu-satunya yang perlu ditempuh agar Indonesia menjadi lebih baik.

Nasihat bagi pemodal atas akuisisi perusahaan pulp Eldorado Brasil

Investor wajib meminta pembeli [Eldorado Brasil](#), untuk berkomitmen dalam menerapkan kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang ketat, sehingga akan memperbaiki kinerja sosial, lingkungan dan tata kelola Eldorado. Bila tidak, maka akan pemodal akan terpapar kepada risiko keuangan dan risiko kerusakan reputasi.

Kinerja Eldorado pada isu-isu Sosial, Lingkungan dan Tata Kelola belum menjadi sesuatu yang patut dicontoh. Perusahaan yang memiliki pabrik pulp satu lini terbesar di dunia (1.7 juta ton per tahun), telah terlibat di dalam skandal korupsi dan karena ukurannya yang besar dan rencana ekspansinya (lini produksi ke dua¹ yang berkapasitas 2.5 juta ton per tahun), Eldorado memiliki

risiko besar untuk terlibat di dalam konflik sosial dan lingkungan hidup.

Menurut laporan media yang baru keluar², J&F tengah bernegosiasi dengan APP dan China Paper. Penawar lainnya yang dilaporkan adalah Arauco, Fibria dan APRIL. Perusahaan-perusahaan ini memiliki tingkat komitmen terhadap kebijakan berkelanjutan yang berbeda-beda, di mana beberapa diantaranya terkenal sangat buruk. Investor dengan demikian disarankan untuk mengevaluasi kapasitas pembeli potensial untuk memperbaiki rekam jejak Eldorado, supaya terhindar dari risiko ESG (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola). Panduan mengenai kriteria minimum absolut bagi

pemodal dapat ditemukan di dalam dokumen [Green Paper, Red Lines](#) dan pada situs web [Forests & Finance](#).

1. Sebuah analisis rekam jejak ESG dari para Pembeli Potensial

1.1 APP

Asia Pulp and Paper (APP), anak perusahaan dari konglomerat Indonesia, Sinar Mas Group adalah salah satu dari perusahaan pulp & kertas terbesar di dunia yang terintegrasi secara penuh dan berkontribusi lebih dari setengah kapasitas total pulp Indonesia. APP dilaporkan memberikan penawaran sekitar USD 4.8 miliar (BRL 15 miliar)³ untuk Eldorado Brasil.⁴

APP gagal memenuhi kewajiban finansialnya sebesar USD 14 miliar⁵ pada tahun 2001. APP juga terlibat di dalam kasus korupsi besar yang melibatkan penerbitan izin tanah yang ilegal di Riau, sebuah kasus yang membuat Gubernur Riau dipenjara selama 15 tahun.⁶ Pabrik pulp dan kertas APP di Indonesia telah mendorong deforestasi besar-besaran,⁷ pengeringan lahan gambut, dan konflik sosial di 38 konsesi pemasoknya yang mencakup 2.6 juta hektar, dan ratusan ribu konsesi APP terbakar di dalam kebakaran besar yang terjadi pada tahun 2015. APP dikeluarkan dari FSC pada tahun 2007.⁸ APP mengadopsi Kebijakan Konservasi Hutan di tahun 2013, namun pejabat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia baru-baru ini mengatakan "Kebijakan Konservasi Hutan APP jelas hanyalah sebuah jargon",⁹ setelah Kementerian sekali lagi menemukan kalau APP menanam ulang akasia di dalam lahan gambut yang dilindungi, yang adalah ilegal dan bertentangan dengan Kebijakan APP.

Sebuah evaluasi independen di tahun 2014-15 menemukan ratusan sengketa kepemilikan lahan masyarakat¹⁰ dan konflik sosial di sepanjang konsesi pemasok APP. Sebagian besar konflik ini masih belum diselesaikan¹¹ hingga tahun 2017, bertentangan dengan Kebijakan Konservasi Hutan 2013 milik mereka.¹²

BTG Pactual, bank investasi terbesar di Amerika Latin, dilaporkan memberikan nasihat kepada APP terkait dengan kesepakatan potensial ini. Karena BTG Pactual tidak memiliki kebijakan sektor yang kuat¹³ mengenai investasi di sektor kehutanan, kami mendesak BTG Pactual untuk menerapkan uji tuntas (due diligence) ekstra untuk menghindarinya terpapar risiko kerusakan reputasi dan risiko ESG (lingkungan, sosial dan tata kelola). Peringatan yang serupa juga diterapkan kepada pemodal besar APP (lihat <http://forestsandfinance.org>), yang mana kemungkinan juga terlibat di dalam akuisisi Eldorado, dan tidak memiliki kebijakan yang kuat.

1.2 Korporasi Kertas China¹⁴

Perusahaan China ini dilaporkan memberikan penawaran sebesar USD 5.06 miliar (BRL 16 miliar) untuk 100 % saham Eldorado Brasil.¹⁵ Perusahaan tersebut adalah perusahaan induk investasi yang

terlibat di dalam manufaktur dan distribusi kertas dan produk kimia kertas.¹⁶ Namun di atas perusahaan tersebut terdapat perusahaan yang memilikinya – China Chengtong – yang dimiliki langsung oleh Komisi Administrasi dan Pengawas Aset Dewan Provinsi (SASAC)¹⁷ yang merupakan komisi milik negara

Korporasi Kertas China memiliki 3 anak perusahaan yang terdaftar: Foshan Huaxin Packaging, Guangdong Guanhao High-Tech dan Yueyang Paper. Ketiga perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Saham China.¹⁸ Korporasi Kertas China baru-baru ini mencapai sebuah kesepakatan di awal tahun ini dengan Grup Produk Hutan milik Rusia yang akan berinvestasi sebanyak USD 1 miliar untuk membangun pabrik pulp dengan kapasitas 700,000 ton per tahun di Rusia.¹⁹

Korporasi Kertas China, terlibat di banyak kasus pelanggaran kontrak dengan pemasok di China.²⁰

1.3 Fibria

Fibria telah dilaporkan juga memberikan penawaran untuk.²¹ Perusahaan ini sudah memiliki sebuah pabrik dengan kapasitas 1.2 juta ton per tahun di Três Lagoas dan dalam waktu dekat akan membuka lini pabrik ke dua. Fibria dapat melakukan penghematan biaya yang signifikan dari sebuah akuisisi namun Fibria dapat menghadapi pemeriksaan melekat antitrust yang ketat di Brasil.²²

Fibria adalah penghasil pulp eucalyptus terbesar di dunia. Pabriknya di Bahira dan Espírito Santo telah terlibat di dalam beberapa konflik sosial yang sudah berlangsung lama, melibatkan masyarakat adat, gerakan pekerja tanpa lahan dan masyarakat keturunan Afrika.²³ Di pabriknya yang berada di Três Lagoas, perusahaan ini dituduh oleh para pegawainya, mengenai keanehan tenaga kerja yang serius.²⁴

Fibria memang memiliki FSC untuk sebagian besar perkebunannya, namun telah dituduh sebagai kontributor utama atas masalah desertifikasi di Espírito Santo.²⁵

1.4 COPEC

Copec, yang memiliki perusahaan pulp Chile, Arauco, merupakan penghasil pulp terbesar di dunia. Copec mendapatkan kesepakatan dengan Eldorado untuk melakukan pembicaraan eksklusif mengenai pengambil alihan ini, namun waktu untuk pembicaraan seperti ini telah berakhir di awal Agustus, tanpa menghasilkan kesepakatan apapun.²⁶

Arauco, sebagai perusahaan perkebunan milik Chile lainnya, terlibat di dalam sengketa lahan Chile dengan masyarakat adat.²⁷ Arauco juga dihubungkan dengan kelangkaan air, yang disebabkan oleh konsumsi air dalam jumlah besar oleh perkebunan-perkebunannya²⁸, dan dihubungkan dengan kebakaran besar yang mengamuk melewati Chile awal tahun ini. Arauco

memiliki sertifikasi FSC, namun hal ini telah dikritisi oleh beberapa organisasi masyarakat sipil.²⁹

Pada tahun 2004, sebuah tumpahan di pabriknya di Valdivia menyebabkan ribuan angsa leher hitam di suaka marga satwa Rio Cruces mati, sebuah situs Ramsar yang dilindungi secara internasional.³⁰ Rencana untuk membangun sebuah pipa untuk membuang limbah langsung ke laut telah mengundang protes besar-besaran oleh masyarakat lokal.³¹

1.5 APRIL

APRIL, dimiliki oleh Grup RGE milik Indonesia, merupakan perusahaan pulp dan kertas terbesar ke dua di Indonesia. April dilaporkan³² memberikan penawaran terhadap Eldorado Brasil.

APRIL memiliki rekam jejak deforestasi yang besar, pengeringan dan pengrusakan lahan gambut dan konflik sosial terkait lahan. Perusahaan ini dikeluarkan dari FSC. APRIL mengadopsi sebuah Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan pada tahun 2014, namun setelah itu menerima banyak tuduhan pelanggaran atas kebijakan tersebut.³³

2. Isu-isu lingkungan, sosial dan tata kelola Eldorado

Eldorado Brasil hendak dijual, karena pemiliknya, J&F Holdings, harus mengumpulkan dana untuk membayar denda sebesar USD 3.2 miliar (BRL 10.3 miliar) karena perannya di dalam skandal korupsi³⁴ yang mengancam untuk menggulingkan Presiden Michel Temer. Diantara lain, penuntut sedang menyelidiki kejahatan-kejahatan potensial yang melibatkan persetujuan dan pencairan pinjaman bernilai miliaran Reais³⁵ dari Bank Pembangunan Negara BNDES kepada J&F. Eldorado juga sedang diselidiki atas penipuan untuk mendapatkan pendanaan dari skema pensiun³⁶, dan sedang dituntut oleh Fibria karena menyalahgunakan clones³⁷ yang dimiliki oleh kompetitornya.

Pabrik Eldorado berada di sisi timur dekat dengan lahan basah Pantanal, yang merupakan situs Ramsar yang penting secara internasional³⁸ dan merupakan situs warisan dunia berdasarkan UNESCO.³⁹ Karena besarnya area yang dibutuhkan untuk perkebunan yang akan memasok kepada pabrik, terdapat risiko perubahan penggunaan lahan yang akan mendorong perambahan ke area Pantanal. Juga terdapat risiko di mana bila perkebunan tidak dikelola menurut praktik-praktik terbaik, mereka akan memberikan dampak yang besar kepada keanekaragaman hayati lokal, menguras sumber air dan menyebabkan bahaya kebakaran.

Pabrik Eldorado membuang limbahnya ke dalam sungai Paran. Sungai ini melewati Taman Nasional Ilha Grande yang mana terdapat air terjun Iguau yang terkenal, juga menerima limbah dari pabrik Fibria. Bila rencana ekspansi dari kedua pabrik dilaksanakan, sungai tersebut akan menerima limbah dari 4 pabrik

kertas, yang memiliki total kapasitas sebesar 7 juta ton pulp per tahun. Limbah pabrik pulp mengandung klorin dan bahan kimia beracun lainnya yang dapat memberikan dampak merugikan pada organisme-organisme akuatik.

Terdapat risiko yang lebih tinggi bagi dampak-dampak lingkungan ini, karena Analisis Dampak Lingkungan tidak menilai dampak perkebunan, dan juga tidak menilai dampak kumulatif dari 2 (apalagi 4) pabrik kertas besar yang saling bersebelahan.⁴⁰ Lebih jauh lagi, berdasarkan Kantor Penuntut Umum,⁴¹ Analisis Dampak Lingkungan Eldorado disetujui oleh otoritas yang tidak kompeten – Badan Lingkungan Hidup Provinsi (Imasul) – alih-alih Badan Federal (Ibama).

Eldorado Brasil memiliki sertifikasi FSC bagi sebagian besar perkebunannya, namun audit⁴² FSC khusus di tahun 2016 menemukan kalau Eldorado Brasil tidak berhasil untuk mengidentifikasi dengan benar area-area dengan Nilai Konservasi Tinggi dan untuk mendiskusikannya dengan pemangku kepentingan relevan. Eldorado tidak menyediakan peta dari area tempat pasokannya berasal. Sertifikat FSC akan kadaluwarsa pada November tahun ini dan pembaruannya akan bergantung kepada pemilik barunya. Ini bisa menjadi sulit bila pemilik barunya adalah perusahaan yang saat ini dikeluarkan dari FSC, seperti APP dan APRIL. Tidak memiliki sertifikasi FSC akan menyebabkan beberapa pembeli untuk beralih kepada pemasok lain, kemungkinan akan menurunkan pendapatan secara signifikan. Lebih jauh lagi, bila tidak memiliki sertifikat FSC akan membatasi pasar yang dapat dipasok oleh Eldorado atau APP, sekali lagi ini memiliki potensi untuk berdampak kepada kinerja keuangan perusahaan-perusahaan ini.

Eldorado juga telah terlibat di dalam konflik tenaga kerja, di mana para pekerja mogok⁴³ karena kondisi kerja yang buruk, dan karena ditolak haknya untuk membentuk serikat, yang mana bertentangan dengan standar tenaga kerja Inti ILO.⁴⁴

Konflik tenaga kerja dapat berdampak kepada kinerja keuangan perusahaan. Mogok kerja mendatangkan biaya yang signifikan karena hilangnya produksi dan pendapatan di saat yang sama biaya tetap masih tetap ada. Lebih jauh lagi, resolusi konflik juga dapat memberikan biaya, dan ketika resolusi hanya dicapai di pengadilan, ini juga dapat berakhir dengan denda karena bertentangan dengan standar atau hukum ketenagakerjaan.

Intinya, Eldorado menderita oleh berbagai isu lingkungan, sosial dan tata kelola yang dapat berdampak parah kepada kelayakan keuangan perusahaan bila pemilik barunya tidak mengatasi isu-isu ini dengan baik.

Kesimpulan

Akuisisi Eldorado oleh sebuah pihak dengan rekam jejak yang buruk dalam perlindungan lingkungan hidup,

dalam mempertimbangkan hak azasi manusia, atau patuh kepada standar-standar tata kelola fundamental, dapat mendatangkan bencana.

Pemodal potensial didorong untuk meminta pembeli akan menerapkan pengelolaan praktik-praktik terbaik dan memelihara standar dan praktik ESG tingkat tinggi.

Kami mendesak Bank Sentral Brasil, Dewan Administratif Brasil untuk Pertahanan Ekonomi (Conselho Administrativo de Desas Econômica - CADE), Komisi Pengawas Sekuritas dan Perdagangan Saham (Comissão de Valores Mobiliários - CVM) dan otoritas berkompeten lainnya untuk terlibat dengan pemangku kepentingan finansial yang terlibat untuk meminta kriteria ESG yang diterapkan.

endnote:

- 1 <http://www.eldoradobrasil.com.br/Institucional/Quem-Somos/vanguardia20>
- 2 <http://www.valor.com.br/international/news/5078116/asia-pulp-paper-poised-buy-eldorado-brasil>; <http://www.valor.com.br/empresas/5078318/jf-negocia-eldorado-com-asiatica-app>; <http://www.valor.com.br/empresas/5096624/app-oferece-r-15-bi-pela-eldorado> <https://www.reuters.com/article/us-global-oil-idUSKCN1B01Z>
- 3 <http://www.valor.com.br/empresas/5078318/jf-negocia-eldorado-com-asiatica-app>
- 4 RAN 2017, Every investor has a responsibility (Setiap Investor memiliki sebuah tanggung jawab). Available at: https://d3n8a8pro7vhm.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/17702/attachments/original/1497287352/RAN_Every_Investor_Has_A_Responsibility_June_2017.pdf?1497287352
- 5 <http://www.scmp.com/business/companies/article/1780979/us14b-default-forgotten-indonesia-billionaire-widjaja-sells-debt>
- 6 http://wwf.panda.org/wwf_news/?159162/APPs-forest-clearing-linked-to-12-years-of-human-and-tiger-deaths-in-Sumatra
- 7 https://d3n8a8pro7vhm.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/17702/attachments/original/1497287352/RAN_Every_Investor_Has_A_Responsibility_June_2017.pdf?1497287352
- 8 <https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/asia-pulp-and-paper-app>
- 9 <http://www.foresthins.news/app-business-transformation-not-substantial-monitoring-finds>
- 10 <http://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/uploads/4/150205-Rainforest-Alliance-APP-Evaluation-Report-en.pdf>
- 11 https://www.asiapulppaper.com/system/files/170313_fcp_progress_updates_-_march2017v2_0.pdf
- 12 <https://www.asiapulppaper.com/sustainability/vision-2020/forest-conservation-policy>
- 13 <http://www.environmentalpaper.eu/in-the-red/>
- 14 Jangan bingung dengan China Paper Holdings karena apa yang telah dilakukan oleh banyak media. China Paper Holdings adalah sebuah perusahaan induk yang didirikan di Bermuda. Sebelumnya dijual pada Bursa Saham Singapura. Namun demikian, setelah api pada operasinya di China, rekaman keuangannya kemudian hilang. Dengan demikian tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya kepada bursa saham, dan kemudian ditangguhkan. Satu-satunya anak perusahaan dengan aktivitas usaha apapun adalah anak perusahaannya di China. Anak perusahaan ini sekarang juga ditangguhkan di China. Holding company ini nampaknya masih beroperasi, walaupun tidak jelas dimana lokasi operasi-operasinya..
- 15 <https://www.reuters.com/article/us-eldorado-m-a-china-paper-idUSKCN1B31P0>
- 16 <https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=10945484>
- 17 Qi Xin Bao (2017, August), China Chengtong, p. 1.
- 18 <http://www.zwt.com.cn/contents/2/1.html>
- 19 China Pulp & Paper (2017, January 12), "Investments exceed US\$ 1 billion, China Paper plans to build 700,000 ton per annum capacity pulp mill in Russia", online: <http://www.chinapulp.cn/news/201701/12/zx11426.html>, viewed in August 2017.
- 20 Qi Xin Bao (2017, August), China Paper Investment-Risks, p. 1.
- 21 <http://markets.businessinsider.com/news/stocks/r-china-paper-mulls-5-bln-bid-for-brazils-eldorado-media-2017-8-1002279006>; <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral/fibria-quer-se-unir-a-arauco-na-eldorado,70001869890>
- 22 <https://www.reuters.com/article/us-eldorado-brasil-m-a-empresas-copec-idUSKBN1AK2EN>
- 23 http://awsassets.panda.org/downloads/brazilpulppapercasestudy_pdf.pdf; <http://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/brazil-the-monoculture-eucalyptus-company-veracel-celulosa-is-trying-to-evict-indigenous-pataxo-from-their-land/>; <http://quote.morningstar.com/stock-filing/Annual-Report/2015/12/31/t.aspx?t=:FBR&ft=20-F&d=aa4b39ba1af27c1f40724129528ff5fd>
- 24 <http://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section2/brazil-rising-profits-do-not-prevent-layoffs-fibria-celulosa-in-mato-grosso-do-sul/>
- 25 https://news.mongabay.com/2017/03/pressure-over-water-in-brazil-puts-pulp-industry-in-the-spotlight/?n3wsletter&utm_source=Mongabay+Newsletter&utm_campaign=70c741f76a-newsletter_2017_03_02&utm_medium=email&utm_term=0_940652e1f4-70c741f76a-67232023
- 26 <https://www.reuters.com/article/us-eldorado-brasil-m-a-empresas-copec-idUSKBN1AK2EN>
- 27 <http://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/chile-discredited-fsc-label-continues-to-legitimize-industrial-tree-plantations/>
- 28 <http://resumen.cl/2015/05/agua-para-quien-escasez-hidrica-y-plantaciones-forestales-en-la-provincia-de-arauco-un-informe-develador-y-por-eso-indignante/>
- 29 <http://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/chile-discredited-fsc-label-continues-to-legitimize-industrial-tree-plantations/>
- 30 <http://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section2/uruguay-the-ence-arauco-and-stora-ensos-eucalyptus-and-pulp-fairytales/>
- 31 <http://www.noalduco.com/>
- 32 <http://www.valor.com.br/empresas/5078318/jf-negocia-eldorado-com-asiatica-app>
- 33 <https://www.banktrack.org/company/april#popover=issues>
- 34 <http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40109232>
- 35 <http://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-jbs-fine-idUSKBN1910MW>
- 36 <http://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-idUSKBN16F25W>
- 37 <http://www.fibria.com.br/r2015/en/multas-acoes-judiciais.html>
- 38 <http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sitelist.pdf>
- 39 <http://whc.unesco.org/en/list/999>
- 40 <http://www.environmentalpaper.eu/wp-content/uploads/2017/03/170314-Pulp-Mill-Expansion-in-Brazil-discussion-document.pdf>
- 41 <http://www.prms.mpf.mp.br/servicos/sala-de-imprensa/noticias/2015/08/mpf-ms-ibama-deve-averiguar-impactos-cumulativos-de-empreendimentos-no-rio-parana>
- 42 <http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P3300000hq2VJEAY>
- 43 <https://www.jpnews.com.br/tres-lagoas/terceirizados-da-eldorado-decretam-greve-mais-uma-vez/45191/>
- 44 <https://www.jpnews.com.br/tres-lagoas/justica-manda-eldorado-reintegrar-funcionario-demitido-ha-3-meses/89756/>

Laporan “**In the Red**” – Kebijakan bank di sektor pulp dan kertas

In the Red – Kebijakan Bank gagal untuk memastikan mereka akan menghindari dari investasi tidak bertanggung jawab di dalam industri kertas.

Sebuah penilaian baru oleh EPN (Environmental Paper Network) atas kebijakan-kebijakan bank telah diselesaikan dan diterbitkan di sini: <http://www.environmentalpaper.eu/in-the-red/>

Penilaian ini mempelajari seberapa siap sektor keuangan dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial dari keterlibatan sektor keuangan dengan industri pulp dan kertas. Dari 2016 sampai dengan 2017 kami melakukan penilaian benchmark atas kebijakan-kebijakan pulp dan kertas dari 42 bank swasta terhadap persyaratan yang ditetapkan pada tahun 2017 di dalam [Green Paper, Red Lines](#). Red Lines adalah kriteria lingkungan dan sosial, yang mengartikulasikan persyaratan minimum yang perusahaan-perusahaan pulp dan kertas wajib penuhi sebelum investasi dipertimbangkan ke dalam perusahaan-perusahaan tersebut.

42 bank terpilih tersebut terdiri dari salah satu pemodal terbesar sektor pulp dan kertas, dan/atau terlibat di dalam “Kesepakatan-Kesepakatan yang Tidak Jujur”, misalnya proyek pabrik kertas yang menjadi subyek

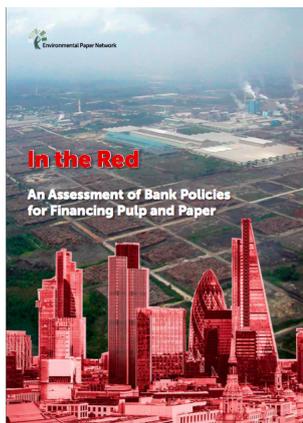
kampanye aktif dari anggota organisasi kami karena dampak lingkungan dan sosial mereka yang berbahaya. Kami melakukan sebuah studi kualitatif yang mendalam atas kerangka kebijakan yang tersedia secara publik dari tiap bank dan menilai hingga sejauh apa kebijakan bank melindunginya dari risiko klien untuk melanggar setiap Red Line.

Hasil dari penilaian kami menyingkap bahwa kebijakan-kebijakan bank sangatlah mengecewakan. Sayangnya tidak satupun dari bank yang kami nilai mampu benar-benar melindungi dirinya dari klien yang melanggar Red Lines. Memang untuk sebagian besar Red Lines, kebanyakan bank tersebut, paling bagus hanya terlindungi sebagian. Kami hanya dapat menyimpulkan kalau sektor perbankan tidak memiliki kebijakan yang sesuai untuk menghindari investasi ke dalam proyek dan perusahaan pulp dan kertas yang merusak.

Red Lines kami sangat didukung oleh lebih dari 140 organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia. Kami harap sektor perbankan akan bekerja sama dengan kami untuk mendorong industri pulp dan kertas menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

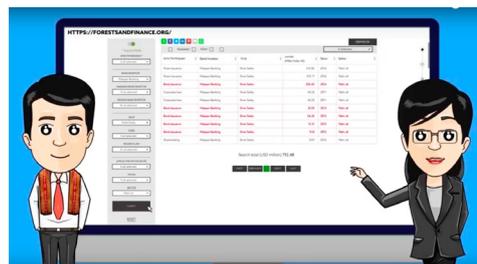
Seluruh penilaian dan rekomendasi tersedia di sini: <http://www.environmentalpaper.eu/in-the-red/>

Publikasi



In the Red Environmental Paper Network

In the Red – Kebijakan Bank gagal untuk memastikan mereka akan terhindar dari investasi tidak bertanggung jawab di dalam industri kertas



[Video baru tentang Forests&Finance](#)

Pelajari cara melakukan penelusuran dasar di situs web Hutan & Keuangan dengan video baru ini.



Perbankan Berkelanjutan: Apa yang perlu dilakukan dan yang Sebaiknya Dihindari

BankTrack, TuK INDONESIA

[Download](#)



[Situs kami memiliki tampilan baru!](#)

Agenda

- 25 - 27 September : [PRI in Person](#), Berlin, Jerman.
- 27 - 28 September : [PRI-PEI Responsible Investment Forum](#), Berlin, Jerman
- 25 - 26 Oktober : [PRI World Pension Summit](#), Den Haag, Belanda
- 23 Oktober : [Equator Principles Pertemuan Tahunan](#), São Paulo, Brazil
- 9 - 10 November : [G20 Sherpa meeting](#)
- 27 - 30 November : [RT15 RSPO](#), Bali, Indonesia

Tentang Newsletter

Buletin *Forests and Finance* merupakan publikasi triwulan *TuK INDONESIA* dan *Profundo*. Buletin ini menyediakan berita perkembangan tentang kampanye Hutan & Pembiayaannya di Indonesia. Kampanye ini bertujuan untuk menghentikan semua arus keuangan yang menyebabkan deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Kami meminta Otoritas Keuangan untuk mengimplementasikan peraturan yang kuat mengenai sosial, lingkungan dan tata kelola yang harus dipenuhi oleh Lembaga Jasa Keuangan. Kami juga bekerja sama dengan LSM dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh perusahaan kelapa sawit dan perusahaan kertas dan bubur kertas dengan melibatkan bank-bank yang membiayai aktivitas bisnis mereka. Proyek ini dibiayai oleh *NORAD*.

